

OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM MENDUKUNG E-GOVERNMENT DI DESA PANGGARANGAN KABUPATEN LEBAK

Hasyim Adnan, Ratu Milah Hamdalah*, Dwi Iis Muhayati

STISIP Banten Raya

Email*: Ratumilaa@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Mendukung E-Government di Desa Panggarangan Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung e-government di Desa Panggarangan Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh Pemerintah Desa Panggarangan dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan pelayanan publik, membantu mencapai suatu kebijakan tertentu, membantu kontribusi terhadap kebijakan ekonomi, meningkatkan kontribusi terhadap reformasi, dan meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Namun, manfaat tersebut masih belum optimal karena Pemerintah Desa Panggarangan belum memiliki *website* desa yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengurus administrasi dan dokumen penting yang dibutuhkan secara *online*, juga sebagai media informasi serta wadah aspirasi dan pengaduan masyarakat. Selain itu, rendahnya peran Pemerintah Desa Panggarangan dalam mengarahkan dan memfasilitasi kewirausahaan berbasis digital pada masyarakat.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pemanfaatan, Teknologi, Informasi, Komunikasi, E-Government.

This study discusses the Optimization of the Utilization of Information and Communication Technology in Supporting E-Government in Panggarangan Village, Panggarangan District, Lebak Regency. The aim is to find out how to optimize the utilization of information and communication technology in supporting e-government in Panggarangan Village, Panggarangan District, Lebak Regency. The results of this study indicate that the use of information and communication technology by the Panggarangan Village Government can increase efficiency, improve public services, help achieve certain policies, help contribute to economic policies, increase contributions to reform, and increase trust between the government and its people. However, these benefits are still not optimal because the Panggarangan Village Government does not yet have a village website that should be used by the community to take care of administration and important documents needed online, as well as a medium of information and a forum for community aspirations and complaints. In addition, the low role of the Panggarangan Village Government in directing and facilitating digital-based entrepreneurship in the community.

Keyword: Optimization, Utilization, Information, Communication Technology, E-Government.

Receive: February 10, 2025

Revision: February 21, 2025

Accepted: February 26, 2025

Copyright©2025. Hasyim Adnan, Ratu Mila H, Dwi Iis M
This is an open access article under the CC-BY NC-SA license
DOI: <https://doi.org/10.1234/ssrj.v2i2.13>

Pendahuluan

Correspondence Ratu Mila Hamdalah  Email: ratumilaa@gmail.com

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Mendukung E-Government di Desa Panggarangan Kabupaten Lebak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan manusia. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi membuat segala aktivitas manusia menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien, sehingga banyak orang yang memanfaatkannya, termasuk pemerintah. Selama ini pemerintah menerapkan sistem dan proses kerja yang dilandaskan pada tatanan birokrasi yang kaku, oleh karena itu, pemerintah dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan istilah *electronic government* (*e-government*) untuk memangkas birokrasi, dan membuat sistem kerja instansi pemerintah secara terpadu untuk menyederhanakan akses dalam memberikan informasi dan layanan publik sehingga masyarakat, sektor swasta, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan publik secara optimal.

E-government didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah dalam penyediaan layanan publik dan kebijakan. Dalam konteks ini, *e-government* membantu dalam mengurangi birokrasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan menyederhanakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Wicaksono, 2023: 6). Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mendorong penerapan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah yaitu dengan menetapkan kebijakan melalui Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* yang menjadi landasan awal dalam pengembangan *e-government* di Indonesia. Pengembangan *e-government* diarahkan untuk meningkatkan hubungan dan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat (G2C), hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta (G2B), serta hubungan antar lembaga pemerintah (G2G). Selain itu, untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga pengelolaan data dan informasi terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga harus diterapkan mulai dari hulu hingga ke hilir. Itu artinya, pentingnya teknologi informasi dan komunikasi bukan hanya dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi hingga ke tingkat desa untuk memperbaiki penyelenggaraan administrasi dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 84 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa sistem informasi desa dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Namun, tidak semua desa dapat memanfaatkan teknologi dan informasi secara optimal karena adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki.

Desa Panggarangan Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten merupakan salah satu desa yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung *e-government* untuk menunjang kinerja pemerintah desa. Namun dalam penerapannya, masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya, belum memiliki *website* desa dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam

penggunaan layanan digital. Adapun, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung *e-government* di Desa Panggarangan Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini, yaitu dengan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2009: 218-219), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Informan dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Desa Panggarangan, Staf Desa Panggarangan (Operator), Kepala Desa Panggarangan, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Panggarangan, dan Masyarakat Desa Panggarangan.

Sementara, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (2009: 16), diantaranya reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*verification*).

Hasil Dan Pembahasan

Meningkatkan Efisiensi

Peningkatan efisiensi merupakan salah satu manfaat dari penerapan *e-government*. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi dalam perolehan data dan penyampaian informasi.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mempermudah kegiatan administrasi seperti data penduduk atau administrasi desa lainnya dan mempermudah komunikasi antara masyarakat dan pegawai, serta instansi-instansi lainnya. (Wawancara dengan Bapak Akuh Sukmajaya, selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Panggarangan, 11 Juni 2024).

Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan administrasi desa menjadi lebih mudah dan cepat. Kegiatan administrasi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, saat ini mulai beralih ke digital. Ada beberapa aplikasi yang biasa digunakan oleh aparat Desa Panggarangan, seperti Sipades (Sistem Pengelolaan Aset Desa), Epdeskel (Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan), serta Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan). Selain itu, untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaporan hingga pengalokasian dana desa, yaitu menggunakan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), SiTanti (Sistem Informasi Transaksi Non Tunai), dan DULUR Desa agar seluruh proses pengelolaan keuangan desa dapat terawasi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa *e-government* digunakan secara efektif untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengumpulan (*collecting*) dan penyampaian (*transmission*) data, serta penyediaan informasi dan komunikasi melalui berbagai aplikasi yang dimanfaatkan oleh aparatur Desa Panggarangan.

Meningkatkan pelayanan

E-government membuat pelayanan publik menjadi lebih fleksibel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat karena dapat diakses di mana pun dan kapan pun, tanpa adanya birokrasi yang panjang dan kaku, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. *E-government* juga dapat meminimalisasi interaksi langsung dalam proses pelayanan publik yang rentan terhadap korupsi. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Panggarangan adalah sebagai berikut:

Manfaat teknologi informasi dan komunikasi sangat luar biasa, teknologi informasi dan komunikasi dapat menunjang pekerjaan kami, karena kita sudah tidak seperti dulu, membuat KTP harus ke kabupaten dengan membawa banyak persyaratan, sekarang sudah tinggal langsung kami kirim ke Disdukcapil dan ada jawaban, setelah itu bisa kita langsung cetak. (Wawancara dengan Bapak Buharta, S.Pd., selaku Kepala Desa Panggarangan, 24 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah mempermudah pelayanan publik, seperti dalam pembuatan e-KTP, saat ini masyarakat dapat melakukan perekaman di kantor desa sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak yang memiliki jarak sangat jauh dari Desa Panggarangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh Pemerintah Desa Panggarangan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang sebelumnya terkesan lamban dan birokratis, kini bisa dilakukan dengan lebih cepat, mudah dan hemat. Namun, peningkatan pelayanan tersebut belum optimal, mengingat Pemerintah Desa Panggarangan belum memiliki *website* desa yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengurus administrasi dan dokumen penting yang dibutuhkan secara *online*.

Membantu Mencapai Suatu Kebijakan Tertentu

Dengan adanya *e-government*, masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam berbagai ide dan aspirasi yang berguna dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah. Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Panggarangan sebagai berikut:

Iya, untuk saat ini kita tidak bisa terlepas dari teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat juga sudah mulai paham teknologi informasi dan komunikasi walaupun dalam bentuk handphone maupun lainnya. Nah, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini sangat bermanfaat bagi warga, yang pertama adalah warga bisa tahu kebijakan-kebijakan pemerintah desa, yang jelas tentunya ini akan mempermudah warga desa dari mulai pengecekan bansos, data KTP, data pemilu. (Wawancara dengan Iyos, selaku masyarakat Desa Panggarangan, 20 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Panggarangan kini mengalami kemudahan dalam mengakses informasi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah seperti bantuan sosial, E-KTP, data Pemilu, dan lain sebagainya. Hal senada juga diungkapkan oleh masyarakat lainnya sebagai berikut:

Dengan adanya teknologi informasi tentunya sangat mudah sekali, saat ini di mana masyarakat yang dulu tidak mengenal, sekarang dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini Alhamdulillah. Contohnya, saya yang pernah mendapatkan bantuan dari desa, kita tidak hanya mendapatkan informasi dari desa tapi dari internet pun kita bisa mengecek kapan kita akan mendapatkan bantuan tersebut. Dampak yang dirasakan sangat bagus sekali karena dapat memudahkan kita sebagai masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan dan sosial, jadi bukan hanya informasi desa saja. (Wawancara dengan Noni, selaku Masyarakat Desa Panggarangan, 21 Juni 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan *e-government* di Desa Panggarangan memberikan dampak positif dalam mencapai suatu kebijakan tertentu. Pasalnya, masyarakat Desa Panggarangan dapat mengakses kebijakan pemerintah dengan mudah sehingga program-program pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat, seperti program bantuan sosial yang biasa diakses oleh masyarakat Desa Panggarangan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, kini masyarakat dapat mencari tahu data penerima manfaat bantuan sosial dengan cara mengunduh suatu aplikasi atau membuka laman *website* yang telah disediakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai inovasi dalam upaya peningkatan ketepatan penyaluran dana bantuan sosial. Dengan demikian, maka kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat berjalan efektif.

Membantu Kontribusi terhadap Kebijakan Ekonomi

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi desa. Pemerintah desa seyogyanya dapat mendukung dan memotivasi masyarakat untuk mendorong kemandirian ekonomi desa. Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Panggarangan, menyarankan kepada Pemerintah Desa Panggarangan sebagai berikut:

Warga diberikan arahan untuk pertumbuhan ekonomi, apalagi sekarang kan kita bisa melihat perkembangan di dunia usaha, seperti usaha online dan sedikit difasilitasi desa yang intinya diarahkan oleh desa untuk berwirausaha. (Wawancara dengan Iyos, selaku Masyarakat Desa Panggarangan, 20 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dinyatakan bahwa masyarakat ingin diarahkan oleh Pemerintah Desa Panggarangan untuk berwirausaha dan dapat difasilitasi dalam penjualan produk secara *online*, sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Sementara, hasil wawancara dengan Kepala Desa Panggarangan menyatakan hal sebagai berikut:

Teknologi sangat menunjang sekali, dengan masuknya ke wilayah Desa Panggarangan, itu adalah tujuan, visi, dan misi kami, bahwa delapan puluh persen

masyarakat Desa Panggarangan adalah kaum petani. Tentunya apa yang kami hasilkan, para petani ini tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan, harus ada penjualan ataupun yang menerima barang yang kami hasilkan. Dengan adanya teknologi informasi ini, kami sudah tahu harga cabai, palawija, ataupun yang lainnya kisaran berapa harganya, jadi intinya teknologi ini sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program-program desa lainnya. (Wawancara dengan Bapak Buharta, S.Pd., selaku Kepala Desa Panggarangan, 24 Juni 2024).

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu masyarakat Desa Panggarangan yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani untuk mendapatkan informasi terkait harga pasar terkini hasil pertanian seperti cabai, palawija, dan lainnya, sehingga menjadi tolak ukur dalam menentukan harga jual hasil pertanian mereka kepada konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam membantu kontribusi terhadap kebijakan ekonomi belum begitu optimal karena rendahnya peran Pemerintah Desa Panggarangan dalam mengarahkan dan memfasilitasi kewirausahaan berbasis digital pada masyarakat. Melalui media sosial dan *e-commerce*, masyarakat dapat memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Panggarangan.

Meningkatkan Kontribusi terhadap Reformasi

Urgensi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah adalah untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik, yaitu mencakup perbaikan dalam kualitas layanan publik, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi membuat informasi menjadi lebih terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi kinerja pemerintah desa dengan mudah. Hasil wawancara dengan Staf Pemerintah Desa Panggarangan sebagai berikut:

Bisa, kami juga sudah menyediakannya seperti profil desa yang kita pampang di depan kantor desa dan ada juga anggaran desa yang kita pampang setiap tahunnya di depan kantor desa, dan itu menggunakan dari aplikasi Siskeudes dari Kepala Urusan Keuangan itu. (Wawancara dengan Bapak Ihsan Nudin, selaku Staf Pemerintah Desa Panggarangan, 12 Juni 2024).

Hal senada juga diungkapkan oleh informan lainnya, yang menyatakan bahwa “bisa, contohnya rencana anggaran pendapatan dan belanja desa dan realisasinya bisa kita pampang di depan maupun *website*, namun melalui *website* belum dimaksimalkan.” (Wawancara dengan Bapak Septo, selaku Staf Pemerintah Desa Panggarangan, 11 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menyatakan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi seperti profil desa, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta realisasinya yang selalu dipublikasikan di papan informasi kantor Desa Panggarangan setiap tahunnya. Namun, informasi-informasi tersebut belum bisa diakses melalui *website* karena Desa Panggarangan belum memiliki *website* desa.

Adapun, informasi mengenai anggaran dana desa yang dipublikasikan, yaitu berasal dari aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) yang dikelola oleh Kepala Urusan Keuangan Pemerintah Desa Panggarangan.

Hasil penelitian yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kontribusi terhadap reformasi khususnya transparansi informasi di Desa Panggarangan. Namun, informasi tersebut tidak bisa diakses melalui media digital karena Desa Panggarangan belum memiliki *website* desa. Di era digital seperti saat ini, *website* menjadi sangat krusial sebagai sarana penyebaran informasi. Hal ini tentunya menjadi suatu kendala bagi masyarakat yang membutuhkan informasi secara cepat dan mudah.

Meningkatkan Kepercayaan antara Pemerintah dengan Masyarakatnya

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan *good governance*. Dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik, seperti peningkatan transparansi dan pengurangan korupsi, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hasil wawancara dengan Bapak Septo, selaku Staf Desa Panggarangan yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa Panggarangan semaksimal mungkin mentransparansikan data kepada masyarakat, seperti paparan anggaran yang dapat diakses tidak hanya melalui teknologi saja tetapi dipublikasikan juga di depan kantor desa.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga dapat dilakukan dengan menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat dalam media berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti *website* yang dilengkapi dengan layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagai bentuk komunikasi dua arah yang mudah diakses oleh seluruh elemen masyarakat. Sementara, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Panggarangan belum dapat menampung aspirasi dan pengaduan dari masyarakat dalam media berbasis teknologi informasi dan komunikasi karena pemerintah desa belum memiliki *website* desa maupun media sosial lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh Pemerintah Desa Panggarangan dalam meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakatnya belum optimal. Hal itu disebabkan karena belum adanya *website* maupun media sosial lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Desa Panggarangan sebagai media informasi serta wadah aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung *e-government* di Desa Panggarangan masih belum optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh Pemerintah Desa Panggarangan dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan pelayanan publik, membantu mencapai suatu kebijakan tertentu, membantu kontribusi terhadap kebijakan ekonomi, meningkatkan kontribusi terhadap reformasi, dan meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Namun, manfaat tersebut masih belum optimal karena Pemerintah Desa Panggarangan belum memiliki *website* desa yang seharusnya dapat dimanfaatkan

oleh masyarakat untuk mengurus administrasi dan dokumen penting yang dibutuhkan secara *online*, juga sebagai media informasi serta wadah aspirasi dan pengaduan masyarakat. Selain itu, rendahnya peran Pemerintah Desa Panggarangan dalam mengarahkan dan memfasilitasi kewirausahaan berbasis digital pada masyarakat.

Referensi

- Aminudin, Nur., & Ahmad Ahlun Nazar. (2019). Langkah-langkah Taktis Pengembangan E-Government untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu. *Aisyah Journal of Informatics and Electrical Engineering Universitas Aisyah Pringsewu*, 1 (1), 89-95.
- Darmawan, Ikhsan. (2011). E-Government: Studi Pendahuluan di Kabupaten Sragen. *Prosiding Simposium Nasional Otonomi Daerah*. LAB-ANE FISIP UNTIRTA.
- Gultom, Martinus Filemon., Leonardo Simanjuntak., Ayu Efrita Dewi., & Heni Widiyani. (2024). Peran Teknologi Informasi dalam Pencegahan Korupsi (Studi Kasus Implementasi Sistem E-Government). *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2), 33-42.
- Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Miles, Matthew B., & A. Michael Huberman. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muliawaty, Lia., & Shofwan Hendryawan. (2020). Peranan E-Government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11 (2), 101-112.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wicaksono, Soetam Rizky. (2023). *Konsep Dasar E-Government*. Malang: CV. Seribu Bintang.